BAB III

PEMBAHASAN

A. Implementasi E-KTP

Implementasi e-KTP dalam Pembahasan ini yaitu mulai dari sosialiasi Oktober tahun 2011 hingga pembagian e-KTP November 2012.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah:

Table 7.

Implementasi e-KTP Kota Yogyakarta 2011-2012

No	Tahun	Implementasi
1	Oktober 2011	Sosialisasi dan Pembagian Undangan
2	4 Oktober 2011-November 2012 (dan seterusnya)	Perekaman data
3	22-Juni 2012-November 2012(dan Seterusnya)	Pembagian e-KTP

1. Sosialisasi dan Pembagian Undangan Pembuatan e-KTP

Di kota yogyakarta e-KTP dilaksanakan pada tanggal 04 oktober 2011 serentak di 14 kecamatan,tentu jauh hari sebelumnya sosialisasi sudah dilakukan seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil "sosialisasi sudah dilakukan jauh hari sebelumnya,kita sudah memanggil camat dan lurah supaya e-KTP segera

disosialisasikan kemasyarakat hingga ketingkat RT/RW[1]".sedangkan bentuk sosialisasinya antara menempelkan poster,media koran,radio dan lewat seminar "kita tempel poster,memanggil wartawan dan bahkan ada beberapa kali seminar di UGM yang itu mahasiswa dari kampus lainpun di undang" yang artinya sosialisasi sudah dilakukan dengan baik,buktinya pada hari pertama perekaman e-KTP di Yogyakarta mencapai 70 persen dari seluruh undangan yang hadir.

Table 8. Wajib KTP di Kecamatan Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Wajib KTP
1	TegalRejo	30.321
2	Jetis	23.192
3	Gondokusuman	36.316
4	Gedongtengen	16.856
5	Ngampilan	15.357
6	Wirobrajan	21.770
7	Mantrijeron	28.507
8	Kraton	18.513
9	Gondomanan	13.023
10	Pakualaman	8.930
11	Mergangsan	25.628
12	Umbulharjo	51.500
13	Danurejan	17.916
14	Kotagede	24.485
15	Jumlah	332.314

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

[1] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Dari 332.314 wajib KTP di Yogyakarta sudah 3.312 warga yang telah direkam data kependudukannya.seperti yang dikatakan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil "Kalau dihitung prosentase dari wajib KTP baro 0,99 persen satu hari kemarin. Undangan yang kita sebar hari kemarin di tiap kecamatan sebanyak 290 KK"[2].Menurut Bambang Anjar Jalumurti selaku anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang mendatangi Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada saat itu mengatakan" Hingga satu pekan pelaksanaan E-KTP kurang lebih baru 70% masyarakat yang diundang datang untuk membuat E-KTP di Kecamatan. Secara sosialisasi sudah dianggap menyentuh lapisan masyarakat sehingga evaluasi bukan pada point sosialisasi namun pada tingkat partisipasi masyarakat"[3].

Gambar 2.Mekanisme Pembuatan e-KTP

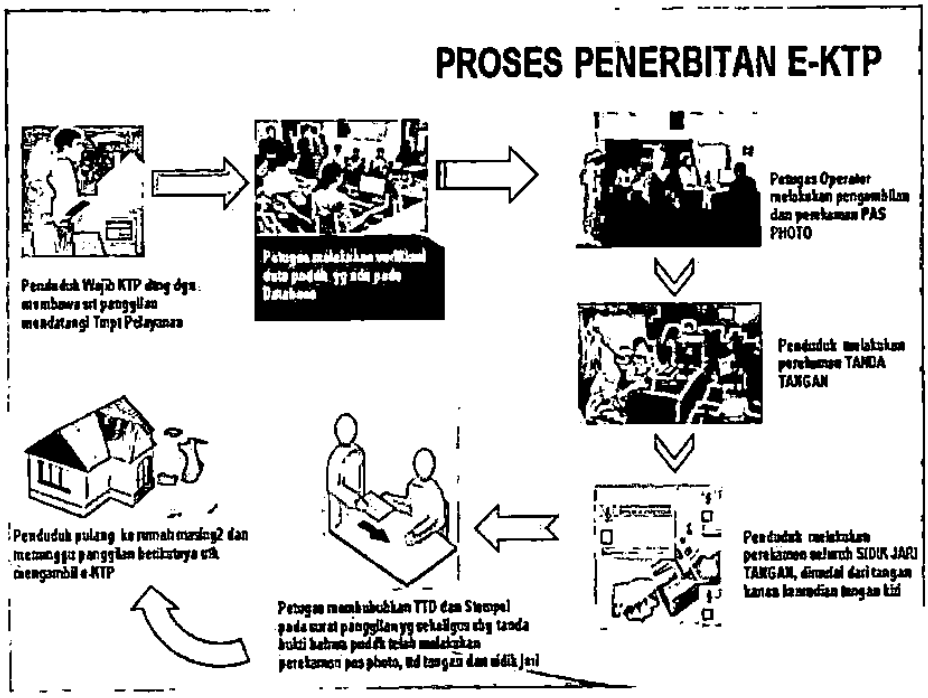

Sumber Dinas kependudukan dan pencatatan sipil,2012

---

[2] Lihat http://jogja.tribunnews.com/2011/10/05/pelaksanaan-e-ktp-hari-pertama-di-yogyakarta-capai-70-persen diakses 20 maret 2012

[3] [illegible] diakses 14 november

Sedangkan mengenai mekanisme pemanggilan penduduk oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu undangan dibuat oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang nantinya undangan ini akan diserahkan ke 14 kecamatan di kota yogyakarta.kemudian setelah kecamatan menerima undangan pembuatan e-KTP tersebut maka pihak kecamatan akan membagikan undangan tersebut kepada masyarakat dengan bantuan lurah ataupun kepala desa,untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibwah

Gambar 3. Mekanisme Pemanggilan Penduduk

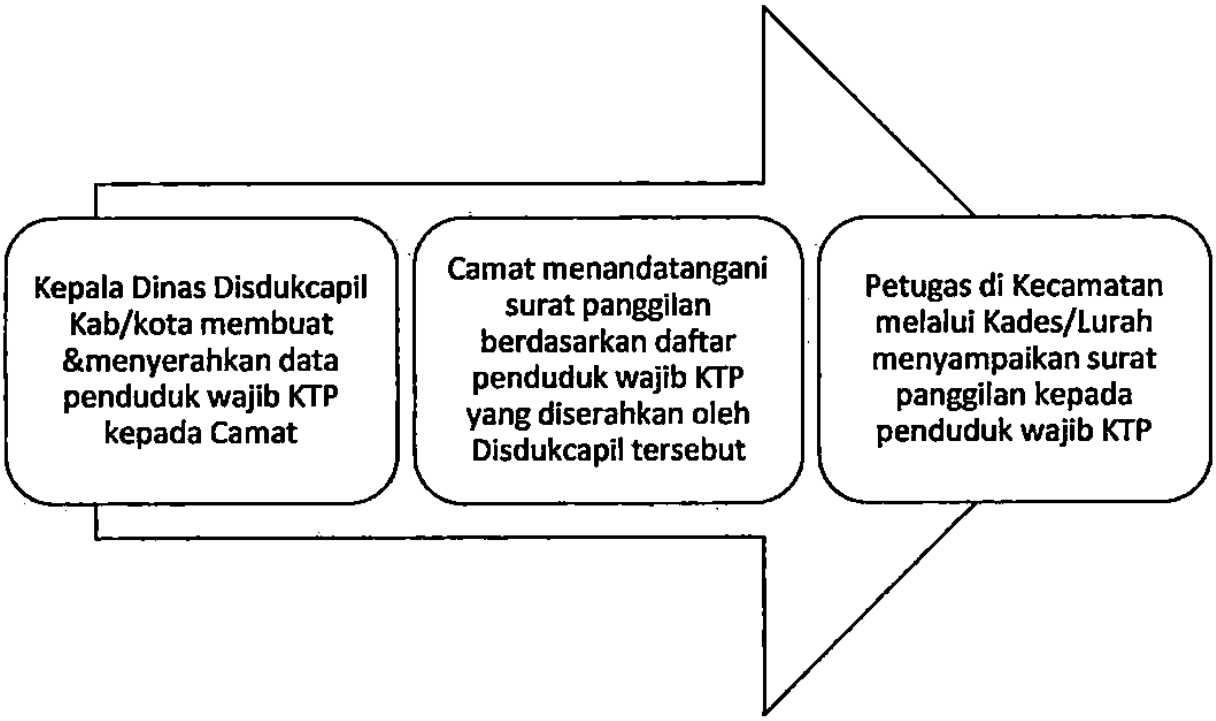

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 2012

Adapun pendapat masyarakat terhadap sosialisasi dan pembagian undangan pembuatan e-KTP yang didapat dari survei terhadap 50 orang yaitu:

Table 9. Pendapat Masyarakat Terhadap Sosialisasi Dan Pembagian Undangan

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	17	34%
Cukup baik	27	54%
Kurang baik	6	12%
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 4. Tingkatan Pendapat Masyarakat

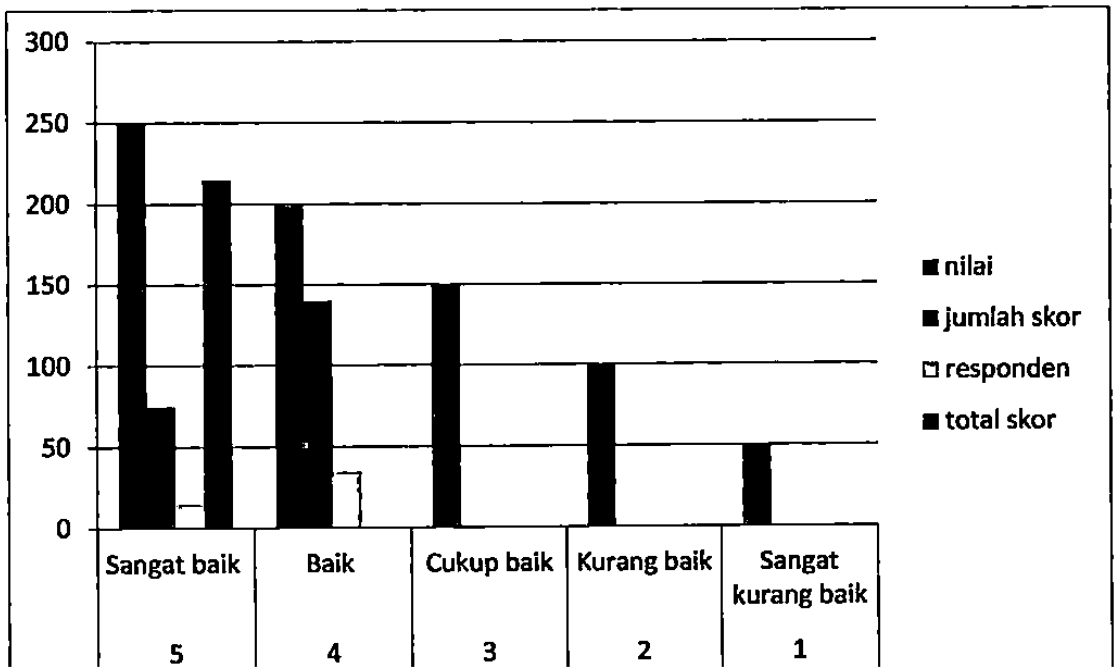

Dari 50 orang masyarakat yang sudah menerima undangan dan melakukan perekaman data e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,54% menganggap bahwa sosialisasi dan pembagian undangan sudah cukup baik,34% sudah baik dan hanya 12% yang menganggap kurang baik, artinya dari data yang diperoleh bahwa,Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah melakukan sosialisasi cukup baik dan itu dilakukan jauh sebelum pelaksanaan perekaman data. Kerja sama dengan penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan juga sudah dilakukan dalam sosialisasi maupun pembagian undangan.seminar yang mengikut sertakan mahasiswa di beberapa kampus juga dilakukan sehingga sosialisasi e-KTP di kota Yogyakarta menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik itu warga yang menetap ataupun warga yang tinggal sementara seperti anak sekolah dan mahasiswa.

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas kependudukan dan pencatatat sipil kota Yogyakarta terlihat bahwa sosialisasi berpengaruh pada sukses atau tidaknya implementasi,dengan adanya sosialisasi yang baik maka tujuan dari sosialisasi untuk memberikan pemahaman,wawasan akan pentingnya e-KTP bisa tercapai sehingga meningkatkan kesadaran,partisipasi dan mempermudah masyarakat dalam mengikuti program ataupun kebijakan

2. Proses Perekaman Data

Setelah sosialisasi dan pembagian undangan dilakukan maka selanjutnya masyarakat yang ingin membuat e-KTP harus melakukan perekaman data baik itu di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil kota yogyakarta,perekaman ini dimulai 4 oktober 2011 yang lalu,namun november 2012 ini masih dilakukan karena masih banyak penduduk kota yogyakarta yang masih belum merekam data.seperti yang dikatakan oleh Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil" Hingga akhir September, warga wajib KTP di Kota Jogja berjumlah 332.875 orang.Namun, masih ada sekitar 75.000 orang yang belum melakukan perekaman data"[4].

Walaupun demikian sejak akhir lebaran lalu jumlah penduduk yang datang untuk melakukan perekaman data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil meningkat."Kebanyakan warga yang melakukan perekaman data ialah warga yang bekerja diluar kota,yang memanfaatkan masa liburan untuk melakukan perekaman data"[5].

Peningkatan jumlah warga yang melakukan perekaman data tersebut terjadi pada hari pertama masuk kerja usai cuti libur lebaran,atau kamis 23/08/2012.dalam 1 hari ada lebih dari 70 orang yang melakukan perekaman data yang pada hari biasa hanya sekitar 20 orang.Adapun kendala dalam perekaman data e-KTP dikota Yogyakarta yaitu pertama kurangnya partisipasi warga dalam melakukan perekaman yang kedua yaitu ketidak mahiran

---

[4] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Deddy Frizza 15 november 2012 di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

[5] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

petugas dalam mengoperasikan alat sehingga membutuhkan waktu lama dalam melakukan perekaman.

Table 10. Capaian Perekaman Data Kecamatan Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Wajib KTP	Capaian Perekaman	Persentase(%)
1	TegalRejo	30.321	22.827	75,28
2	Jetis	23.192	17.447	75,23
3	Gondokusuman	36.316	25.547	70,35
4	Gedongtengen	16.856	13.332	79,09
5	Ngampilan	15.357	12.151	79,12
6	Wirobrajan	21.770	16.825	77,29
7	Mantrijeron	28.507	22.019	77,24
8	Kraton	18.513	14.086	76,09
9	Gondomanan	13.023	9.987	76,69
10	Pakualaman	8.930	6.901	77,28
11	Mergangsan	25.628	20.233	78,96
12	Umbulharjo	51.500	39.799	77,28
13	Danurejan	17.916	13.648	76,18
14	Kotagede	24.485	20.286	82,85
15	Jumlah	332.314	257.300	77,43

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Awalnya perekaman data bisa dilakukan di Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota yogyakarta,selain itu ada juga perekaman yang dilakukan dirumah namun ini hanya untuk penduduk yang

mereka yang lanjut usia dan tidak mampu untuk datang ke Kecamatan ataupun ke sini,dan itu pun hanya satu unit"[6].

Namun sekarang,sejak agustus lalu perekaman data hanya bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil karena untuk Kecamatan fokus pada distribusi e-KTP yang sudah jadi.Adapun proses perekaman data adalah sebagai berikut:

1. Pembacaan biodata; Warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat,pada awalnya bagi warga yang tidak membawa surat pengantar dan KTP lama maka petugas tidak mengizinkan perekaman data,namun kemudian dikarenakan banyak yang lupa membawa surat pengantar maka hal tersebut dimaklumi
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangkan waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum waktu masa perpanjangan.adapun kamera digital yang digunakan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu cannon IOS 1100 sehingga gambar yang dihasilkan lebih jelas
3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam kedalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.pada awalnya petugas harus mengulang proses ini lebih dari tiga kali dikarenakan petugas belum terlalu mahir dalam

[6] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

pengoperasian alat,dan salah satu penyebab kenapa proses perekaman berjalan lambat

4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.sama halnya dengan proses perekaman tanda tangan,scan sidik jari biasanya juga dilakukan berulang-ulang karena kekurang mampuan petugas dalam pengoperasian alat
5. Scan retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain,begitu juga dengan scan retina mata pada awalnya proses inipun memakan waktu yang agak lama.

Adapun pendapat masyarakat terhadap proses perekaman data e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,yang didapat dari survei terhadap 50 orang yaitu:

Table 11. Pendapat Masyarakat Terhadap Proses Perekaman Data e-KTP

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	30	60%
Cukup baik	20	40%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 5. Tingkatan Pendapat Masyarakat

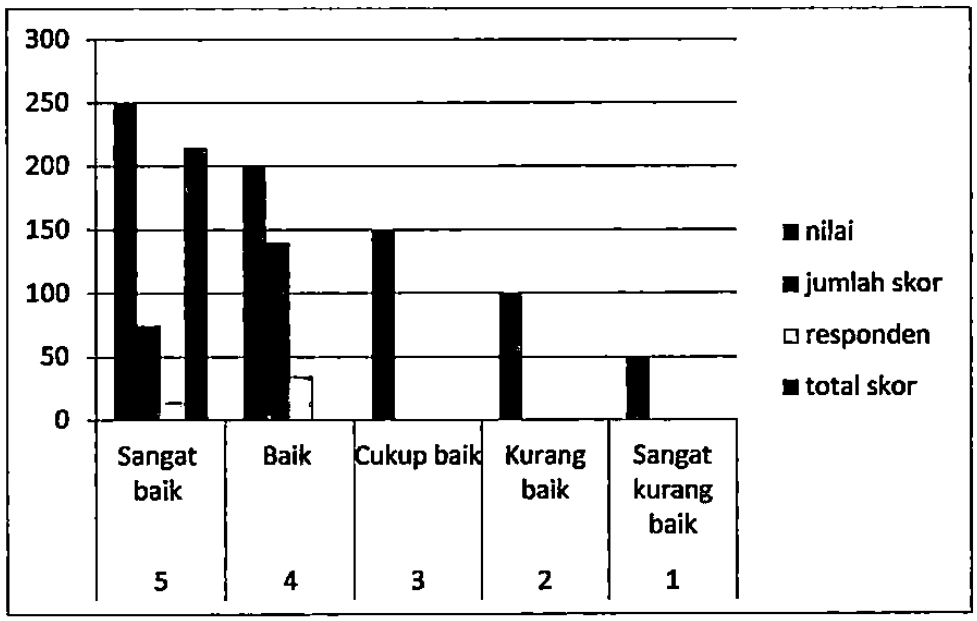

Dari 50 masyarakat yang sudah melakukan perekaman data e-KTP 60% menganggap proses perekaman data baik dan 40% mengangap cukup baik yang artinya proses perekaman data e-KTP sudah cukup baik adapun kendala-kendala pada saat perekaman data seperti ketidak profesionalan petugas,lamanya waktu yang di butuhkan untuk melakukan perekaman dan kurangnya partisifasi masyarakat hanya di awal pelaksanaan saja,dan itu terjadi bukan hanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tetapi juga di tingkat Kecamatan.

Dalam pengoperasian alat awalnya petugas membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk melakukan perekaman data karena sering melakukan kesalahan pada saat scan sidik jari maupun retina mata . permasalahan seperti ini merupakan bagian dan proses dari pembelajaran petugas dilapangan.Hal

scan,walaupun ada pelatihan sebelumnya tapi kondisi dan situasi dilapangan berbeda dari pelatihan.

Sekarang para petugas perekaman data sudah mahir mengoperasikan alat petugas hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk melakukan perekaman data sehingga proses perekaman data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sekarang sudah baik dan bisa dilakukan dengan cepat.Mengenai pasrtisipasi warga dalam proses perekaman sudah membaik, jumlah warga yang melakukan perekaman data semakin meningkat hal ini dikarenakan warga sudah tau bahwa tahun 2013 KTP lama tidak berlaku lagi.

3. Penerbitan e-KTP

Penerbitan e-KTP di kota yogyakarta dimulai sejak 22 juni 2012 lalu,dimana undangan pengambilan e-KTP mulai di distribusikan di setiap kecamatan di kota yogyakarta,distribusi undangan diserahkan kesetiap Kecamatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta.Hingga akhir agustus 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Jogja telah menerima 170.000 fisik e-KTP dari pusat.Seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil" Dari jumlah wajib KTP sebanyak 265.000 orang, kami baru menerima 170.000 keping e-KTP. Sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan,"[7].artinya baru sekitar 66% yang sudah diterima dan ada 34% lagi yang belum diserahkan oleh pusat.

[7] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Table 12. Distribusi e-KTP Di Kecamatan Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Distribusi e-KTP	Capaian Perekaman	Persentase(%)
1	TegalRejo	14.400	22.827	66
2	Jetis	12.450	17.447	71
3	Gondokusuman	13.500	25.547	53
4	Gedongtengen	8.800	13.332	66
5	Ngampilan	8.100	12.151	67
6	Wirobrajan	12.500	16.825	74
7	Mantrijeron	15.400	22.019	70
8	Kraton	10.050	14.086	71
9	Gondomanan	6.500	9.987	65
10	Pakualaman	5.050	6.901	73
11	Mergangsan	13.050	20.233	64
12	Umbulharjo	30.500	39.799	77
13	Danurejan	11.000	13.648	81
14	Kotagede	11.000	20.286	54
15	Jumlah	172.300	257.300	70

Sumber Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dari banyaknya jumlah e-KTP yang sudah di terima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,namun tidak semuanya dapat di distribusikan. Meski seluruh chip e-KTP terbaca di e-reader (alat pembaca), namun ada beberapa persoalan yang dihadapi sehingga tidak semua e-KTP bisa diberikan.Beberapa persoalan yang ditemui terjadi saat proses verifikasi dan validasi data pemilik e-KTP kegagalan verifikasi tersebut bisa disebabkan

1. perubahan status dari warga yang bersangkutan, perubahan status pemilik e-KTP dari belum menikah padahal saat ini sudah menikah. Atau, status pekerjaaan di mana setelah perekaman e-KPT sang pemilik sudah bekerja.
2. Yang kedua yaitu kegagalan verifikasi sidik jari,hal ini bisa disebabkan karena ada beberapa peralatan di tingkat kecamatan yang belum melakukan update sistem aplikasi Automatic Fingerprint Identification System.proses update hanya memakan waktu 30 menit namun kendala adalah jumlah tenaga dari konsorsium yang hanya ada dua orang untuk seluruh wilayah DIY. Sehingga, susah untuk menginstal software Afis di kecamatan tempat peristiwa terjadi.

Kepala Bagian Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIY, Riyadi Mujiarto mengatakan "Proses update aplikasi paling lama 30 menit, jumlah petugasnya hanya ada dua orang untuk saat ini, Namun, jika terjadi permasalah mengenai verifikasi data pihak kecamatan bisa menghubungi petugas konsorsium,"[8].Akan tetapi ada pengecualian terhadap mereka yang lanjut usia,jika mereka yang gagal verifikasi e-KTP akan tetap diberikan.seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil"tetap diberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak bisa melakukan verifikasi bagi mereka yang lanjut usia"[9].

---

[8] Lihat http://jogja.tribunnews.com/2012/07/05/proses-update-aplikasi-paling-lama-30-menit diakses 14 november 2012

[9] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Adapun syarat pengambilan e-KTP yaitu:

1. Fotokopi KK dan surat pengantar RT/RW
2. Formulir permohonan KTP
3. KTP yang telah habis masa berlakunya.
4. Fotokopi paspor, izin tinggal tetap, SKLD (bagi orang asing)

Bagi penduduk yang akan mengambil e-KTP tetapi KTP hilang atau rusak, syarat untuk mengurusnya adalah:

1. KK atau fotokopinya.
2. Surat pengantar RT/RW.
3. Formulir permohonan KTP.
4. Surat keterangan hilang dari kepolisian.
5. Paspor dan KITAP

Akan tetapi di kota yogyakarta syarat ini tidak berlaku,seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil"Bagi warga yang kehilangan KTP, wajib membuat KTP reguler karena petugas di kecamatan tidak merima surat keterangan hilang dari kepolisan saat masyarakat mengambil e-KTP". Pelayanan penyerahan e-KTP tersebut akan dilakukan pada jam kerja dan diharapkan tidak mengganggu pelayanan lain di kantor kecamatan".[10]

Mekanisme pengambilan e-KTP yaitu:

[10] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan

1. Masyarakat yang sudah memperoleh undangan menurutnya dapat langsung datang ke kantor kecamatan untuk mengambil e-KTP dengan menyerahkan KTP lama yang masih berlaku. Pengambilan e-KTP tersebut tidak dapat diwakilkan karena saat mengambil, warga pemilik KTP harus melakukan verifikasi data.apabila warga tidak membawa surat panggilan atau KTP lama maka warga tidak di izinkan mengambil e-KTP
2. Verifikasi data.petugas akan mengecek kesamaan sidik jari pemiliknya dan Setelah data yang tersimpan dalam chip e-KTP tersebut dinyatakan sesuai data pemilik KTP maka e-KTP baru akan diberikan.Seharusnya tidak ada kesalahan data yang tersimpan di dalam chip e-KTP karena saat perekaman, seluruh data tersebut sudah dibacakan.apabila terjadi kegagalan verifikasi data maka e-KTP tidak bisa di berikan,kecuali bagi mereka yang lanjut usia.

Gambar 6. Bentuk e-KTP

Tampak depan

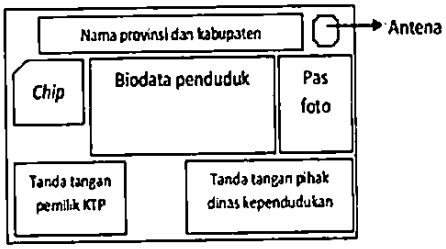

Tampak belakang

tampak belakang

Adapun pendapat masyarakat terhadap pembagian undangan pengambilan dan proses pengambilan e-KTP yang di dapat dari survei terhadap 50 orang yang sudah mengambil e-KTP yaitu:

Table 13. Pendapat Masyarakat Terhadap Pembagian undangan Dan Proses Pengambilan e-KTP

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	26	52%
Cukup baik	24	48%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 7. Tingkatan Pendapat Masyarakat

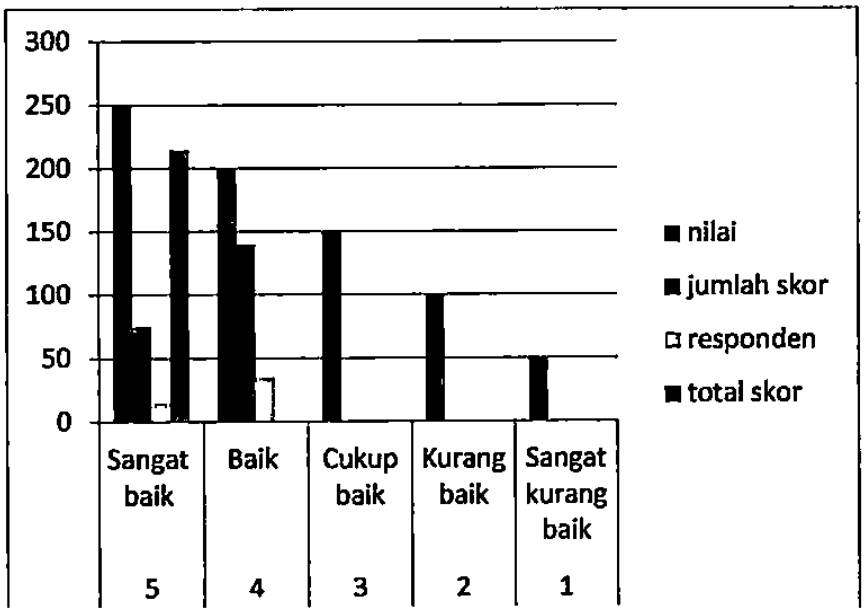

Dari hasil survei diatas 52 % masyarakat menganggap proses dan prosedure pembagian e-KTP sudah baik dan 48% menganggap baik, walaupun ada kendala pengambilan pada proses verifikasi data namun jumlahnya sangatlah kecil,tidak sebanding dengan jumlah warga yang sudah mendapatkan e-KTP.

Kegagalan verifikasi data ini juga bukan semata karena Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil tidak melakukan update software melainkan juga bisa disebabkan oleh kesalahan petugas pusat dalam mengentry data warga atau di karenakan data dari penduduk tersebut yang berubah.e-KTP yang gagal verifikasi belum bisa dibagikan dan akan di tahan di Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil sampai ada Keputusan dari pusat upaya ini sangat bagus untuk mencegah penduduk memiliki KTP ganda atau Pemalsuan indentitas.

Upaya lainya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil juga memberikan pengecualian bagi lansia tidak bisa melakukan verifikasi data dan sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan e-KTP .dari upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk tidak Mempersulit masyarakat tetapi tidak juga melanggar prosedur yang mana bisa menimbulkan permasalahan baru nantinya.jadi ada tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan sejak awal.

Pembagian e-KTP dilakukan sebaik-baiknya dengan memfokuskan pendistribusian di Kecamatan dan perekaman di Dinas,pihak Kecamatan tidak

kekurangan alat sehingga mempercepat pendistribuasian e-KTP berati proses pembagian undangan dan e-KTP sudah dilakukan cukup baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi program e-KTP

1. Komunikasi

Dalam melaksanakan program e-KTP, selaku leading sector Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung- jawab penuh dalam mengimplementasikan e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memainkan peranan komunikasi dengan SKPD agar program e-KTP dapat dimplementasikan dengan baik. Faktor komunikasi menjadi salah satu penentu bagi terlaksananya e-KTP.Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan, mensosialiasasikan e-KTP (transmisi informasi),konsistensi informasi dan kejelasan informasi. Berkaitan dengan sosialisasi program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan Kecamatan di kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Sosialisasi dilakukan dengan mengundang

Masyarakat ke kantor camat untuk diberi pengarahan mengenai e-KTP. Masyarakat diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama beberapa hari. Pihak kelurahan diminta mengorganisir warganya untuk datang ke kantor camat. seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi

mengundang masyarakat untuk nanti kita berikan sosialisasi mengenai e-KTP".[11]

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan petugas dari Kecamatan kota yogyakarta memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP.Dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi paham terhadap program e-KTP, sehingga ketika ingin mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual.

Di sisi lain, kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kota Yogyakarta juga melibatkan media masa secara langsung. Dalam konteks implementasi program e-KTP, media massa hanya terlibat meliput berita-berita mengenai sosialisasi dan proses pelaksanaan pengurusan e-KTP yang dilakukan di kota Yogyakarta. Sementara itu,iklan-iklan sudah disebar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui poster,koran dan televisi lokal, sehingga banyak masyarakat yang sudah tahu mengenai program e-KTP.

Adapun pendapat masyarakat terhadap penyampaian informasi pada saat sosialiasi program e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta pada saat sosialisasi yang didapat dari hasil survey terhadap 50 orang yaitu:

---

[11] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Table 14. Pendapat Masyarakat Terhadap Penyampaian Informasi Pada Saat Sosialiasi Program e-KTP

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	10	20%
Baik	20	40%
Cukup baik	20	40%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 8. Tingkatan Pendapat Masyarakat

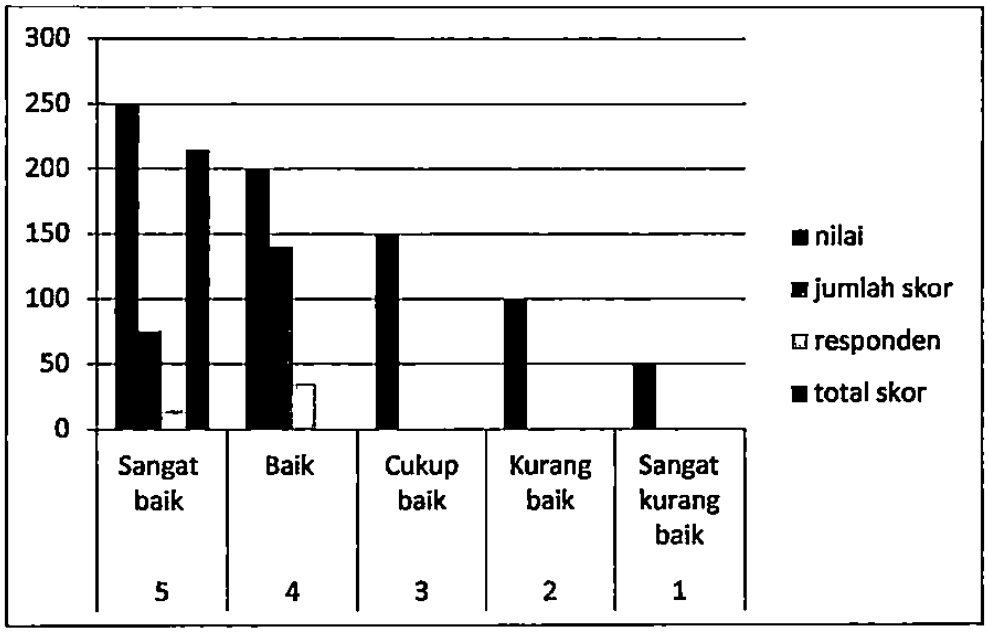

Dari hasil survei diatas 20% orang menganggap sosialisasi program e-KTP sudah sangat baik 40% menganggap baik dan 40% lagi menganggap cukup baik,artinya sosialisasi program e-KTP oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta sudah cukup baik.Dengan adanya perpindahan informasi dari pemerintah kota Yogyakarta mengenai e-KTP kepada masyarakat sangat berbengaruh terhadap pelaksanaan e-KTP.perpindahan infomasi ini berjenjang mulai dari pusat ke daerah dan masyarakat sehingga bisa saja terjadi pertentangan perbedaan penyampaian

dan tujuan,namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan bisa memberikan sosialisasi dengan cukup baik.artinya tidak ada pertentangan walaupun perpindahan informasinya berlapis-lapis sehingga sosialisasi e-KTP bisa efektif.

Sosialisasi yang baik akan membuat masyarakat lebih tau mengenai e-KTP,masyarakat tau mengenai persyaratan,proses dan prosedure pembuatan e-KTP yang artinya pada saat implementasi masyarakat tau apa yang musti mereka lakukan,seperti datang setelah mendapat undangan,apa saja persyaratan yang perlu di bawa pada saat perekaman,dan pada saat pengambilan e-KTP.

Selain transmisi yang baik,komunikasi program e-KTP juga harus memiliki kejelasan.informasi yang diterima masyarakat harus jelas dan tidak bersifat ambigu sehingga miskomunikasi bisa di hindari.adapun sosialisasi yang dilakukan Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota yogyakarta sudah sangat jelas karena baik di iklan maupun seminar mengenai e-KTP dijelaskan secara rinci. Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan "pada saat sosialisasi kita jelaskan sedetail-detailnya jadi informasi yang kita dapat dari pusat itu yang kita sampaikan ke masyarakat".[12]

Adapun bentuk-bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat seperti apa itu e-KTP,apa kelebihanya,kapan proses perekaman dimulai,bagaimana mekanisme perekaman data,apa saja syarat pengambilan e-KTP,semua dokument dan informasi yang didapat dari pusat semua dijelaskan kemasyarakat

[12] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Adapun pendapat masyarakat terhadap kejelasan informasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta pada saat sosialisasi yang didapat dari hasil survey terhadap 50 orang yaitu:

Table 15. Pendapat Masyarakat

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	30	60%
Cukup baik	20	40%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 9. Tingkatan Pendapat Masyarakat

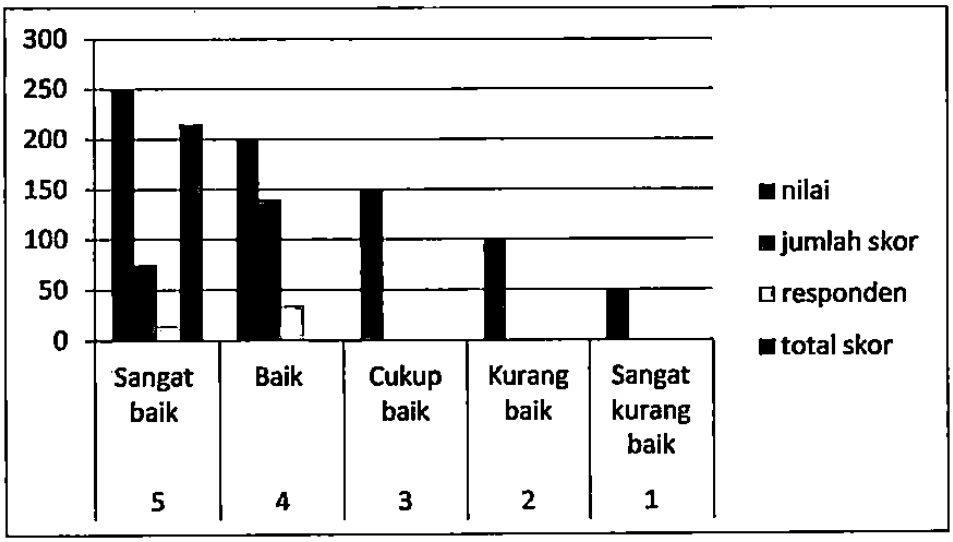

Dari hasil survey diatas 60% masyarakat menganggap kejelasan informasi yang diberikan pada saat sosialisasi sudah baik dan 40%

sudah cukup baik.Artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana program e-KTP sudah cukup jelas dengan menetapkan kapan dan bagaimana program tersebut berjalan karena apabila informasi yang disampaikan kabur atau tidak jelas akan mendorong terjadinya interprestasi yang salah atau mungkin bertentangan dengan pesan awal dari sosialisasi.

Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang mereka dapat dari pusat dan disampaikan kepada masyarakat dengan jelas sehingga dengan adanya kejelasan informasi,maka pada pelaksanaan program e-KTP masyarakat dan pelaksana tidak terhambat oleh hal-hal seperti persyaratan tidak mencukupi,telat dan sebagainya.dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kejelasan informasi pada saat sosialisasi berpengaruh terhadap pelaksaan program e-KTP di kota Yogyakarta.Informasi yang jelas akan mempermudah dan membangkitkan semangat masyarakat berpartisipasi dalam program e-KTP

Selain jelas,komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana e-KTP juga harus konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga masyarakat tidak bingung terhadap informasi tersebut,mengenai konsistensi infromasi yang telah diberikan kepada masyarakat . Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil mengatakan"kita konsisten,kalaupun ada yang berubah itu karena ada perubahan dari pusat,misalnya kami bilang bahwa persyaratan pembuatan e-KTP harus bawa KTP lama namun kemudian ada aturan baru dari pusat kalau syarat tersebut dihapus ya kita harus ikut,itupun pasti kita sosialisasikan".Menurutnya Dinas Kependudukan dan

tidak mau mempersulit masyarakat,kami selalu memberi pengecualian kalau perlu"[13].

Memang ada terjadi perubahan informasi oleh pemerintah kota mengenai e-KTP tapi perubahan seperti apapun akan di sosialisasikan seperti persyaratan pengambilan e-KTP bagi yang tidak memiliki KTP lama,sebelumnya di sosialisasikan bahwa persyaratan bagi yang KTPnya hilang mengurus surat kehilangan kepada kepolisian namun ternyata di kota Yogyakarta pihak kecamatan tidak menerima surat kehilangan,harus mengurus KTP regular.dan hal tersebutpun sudah disosialisasikan.

Adapun pendapat masyarakat tentang konsistensi informasi yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta pada saat sosialisasi yang didapat dari hasil survey terhadap 50 orang yaitu:

Table 16. Pendapat Masyarakat

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	33	66%
Cukup baik	17	34%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

[13] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 10. Tingkatan Pendapat Masyarakat

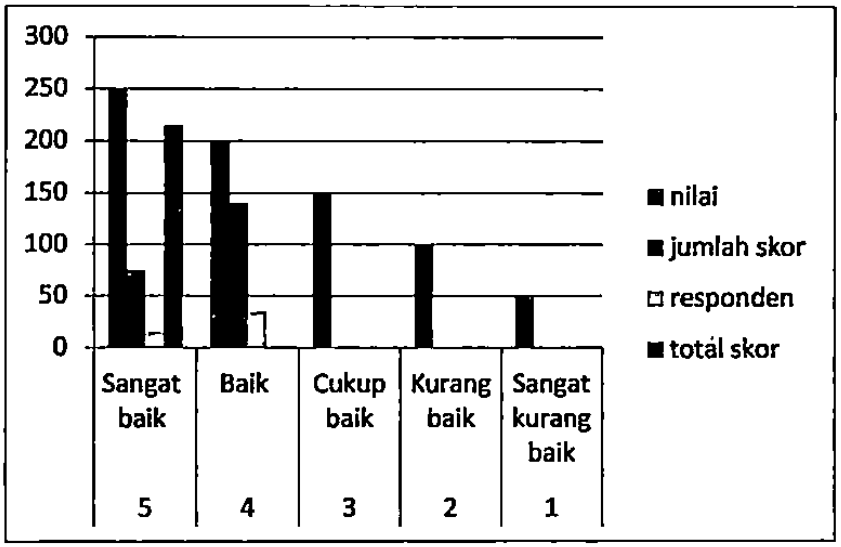

Dari hasil survey diatas 66% masyarakat menganggap konsistensi infromasi pada saat sosialisasi program e-KTP sudah baik dan 44% menganggap cukup baik.artinya informasi yang diberikan pada saat sosialisasi sudah cukup konsisten.jika sosialisasi ingin efektif maka komunikasi juga harus konsisten walaupun sosialisasi mempunyai unsur kejelasan tetapi bila informasi tersebut berubah-ubah maka informasi tersebut tidak akan mempermudah masyarakat namun malah mempersulit.dengan kata lain semakin jelas dan konsisten informasi dalam sosialisasi yang sampaikan kepada masyarakat maka semakin tinggi kemungkinan perintah-perintah atau kebijakan tersebut dilaksanakan.

Sosialisasi atau penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sudah cukup konsisten kalaupun ada informasi yang berubah maka itu segera disosialisasikan lagi oleh Dinas

Pencatatan Sipil dalam dal ini tentu sangat membantu dalam suksenya e-KTP di kota Yogyakarta .maka jelas bahwa konsistensi informasi mempengaruhi program e-KTP di kota Yogyakarta dengan adanya konsistensi informasi masyarakat terhindar dari kebingungan dan kesalahpahaman terhadap persyaratan dan prosedur baik itu pembuatan maupun pengambilan e-KTP, hal tersebut membantu masyarakat berpartifipasi dalam program e-KTP.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi salah satu syarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud di sini, yaitu berupa sumber daya staff dan fasilitas. Sumber daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program. Sumber daya menjadi energi bagi terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya yang mencukupi, mustahil program dapat dilaksanakan dengan baik.

Implementasi program e-KTP di Kota Yogyakarta dilengkapi dengan penyediaan sumber daya. Pemerintah Kota Yogyakarta mempersiapkan dengan matang segala sesuatu yang diperlukan untuk mengimplementasikan e-KTP. Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil memiliki keseriusan untuk melaksanakan program ini. Keseriusan itu bisa dilihat dari kemauan untuk menyediakan sumber daya manusia dan tempat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota yogyakarta telah memersiapkan 8 orang tenaga operator e-KTP. Operator bertugas mengentri

tenaga operator tersebut, 7 orang merupakan PNS fungsional umum dan 1 orang tenaga honorer. Adapun nama-nama operator tersebut

Table 17. Petugas Perekaman Data e-KTP Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

No	Nama	Jabatan
1	Hari Zona	Fungsional umum
2	Novrizal Aswandi	Fungsional umum
3	Deri Kurnia	Fungsional umum
4	Eko Periandi	Fungsional umum
5	Wahyudi	Fungsional umum
6	Said Bernadin	Fungsional umum
7	Afriyaldi	Fungsional umum
8	Mimi	Honorer

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Berdasarkan kenyataan dilapangan bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi program e-KTP di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil belum mencukupi untuk melayani semua masyarakat yang membutuhkan e-KTP. Di mana kebutuhan dalam pelayanan e-KTP ini minimal membutuhkan 10 tenaga operator, yaitu dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.Selain itu ada 2 orang petugas jalan,yaitu petugas untuk setiap peralatan mobile yang jumlahnya hanya 2 unit,alat mobile ini di khususkan untuk lanjut usia dan di arahkan ketempat padat penduduk.alat

dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil "kita punya peralatan mobile,tapi itu juga kurang,target kedepan kita butuh 3-6 alat mobile"[14].

Adapun pendapat masyarakat tentang kemampuan staff dalam mengoperasikan alat pada saat melakukan perekaman data yang didapat dari survey terhadap 50 orang yaitu:

Table 18. Pendapat Masyarakat

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	12	24%
Baik	33	66%
Cukup baik	5	10%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 11. Tingkatan Pendapat Masyarakat

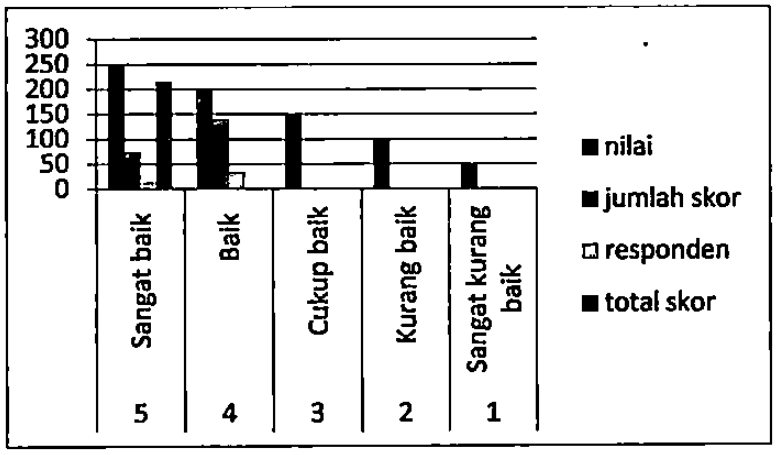

[14] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Dari hasil survey diatas 24 % masyarakat menganggap kemampuan petugas dalam mengoperasikan alat pada saat melakukan perekaman sangat baik,66% menganggap baik dan 10% menganggap sudah baik.Staff atau petugas adalah sumber yang paling penting dalam pelaksanaan program ataupun kebijakan, kurangnya petugas akan menimbulkan persoalan yang bisa menyebabkan implementasi tidak efektif namun jumlah petugas tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan.hal ini berarti jumlah petugas yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi berhasil, ini bisa disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki petugas.Dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan jumlah petugas yang memadai,petugas juga harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam implementasi.

Walaupun Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kekurangan petugas namun dikarenakan petugas makhir dalam menggunakan alat maka hal tersebut tidak terlalu berpengaruh.dengan keahlian tersebut mereka mampu menutupi kekurangan dalam hal jumlah,dan mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif.dalam hal ini sumberdaya manusia di Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil dalam pelaksanaan e-KTP sudah baik.

Selain sumber daya manusia yang ahli di butuhkan juga fasilitas fisik dan alat penunjang yang memadai.secara umum mengenai fasilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan mungkin sudah baik namun mengenai jumlah peralatan yang di butuhkan untuk pelaksanaan program e-KTP sangat minim,adapun perlatan yang dimiliki hanya 2 set yang itu jelas tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan

Kependudukan dan pencatatan sipil"disini kita punya 3 set alat namun ada 1 set yang rusak jadi belum bisa digunakan"[15].

Minimnya peralatan yang dimiliki dalam implementasi program e-KTP di kota Yogyakarta bisa dimaklumi, karena program ini merupakan proyek percontohan (pilot project) di mana peralatan disediakan seluruhnya oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri belum siap menyediakan peralatan yang mencukupi. Selain itu, faktor distribusi peralatan juga menjadi kendala. Peralatan e-KTP kerap kali terlambat di distribusikan ke daerah sehingga daerah mengalami kekurangan peralatan untuk menjalankan e-KTP.

Adapun pendapat masyarakat tentang fasilitas di Dinas kependudukan dan Pencatatan yang didapat dari survey terhadap 50 orang yang telah melakukan perekaman data yaitu:

Table 19. Pendapat Masyarakat

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	0	0
Baik	13	26%
Cukup baik	37	74%
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

[15] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 12. Tingkatan Pendapat Masyarakat

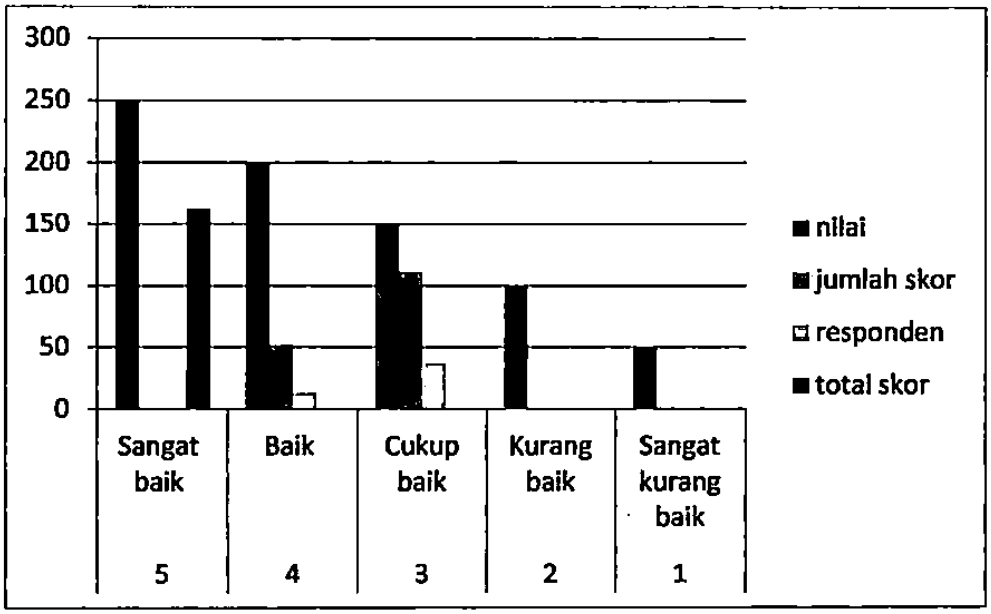

Dari data diatas 74 % masyarakat menganggap fasilitas dan peralatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil cukup baik dan 26% menganggap sudah cukup baik.fasilitas dan peralatan fisik bisa pula menjadi sumber penting dalam implementasi,seorang pelaksana mungkin memiliki petugas yang memadai dan memiliki keahlian di bidangnya tetapi tanpa bangunan kantor dan peralatan yang dibutuhkan besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil,dengan demikian fasilitas sangat penting untuk implementasi kebijakan yang efektif, untuk mendapatkan fasilitas dan kelengkapan peralatan tidaklah mudah.hal ini biasanya terkendala oleh biaya.

Walaupun ada kekurangan peralatan dan fasilitas fisik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi tidak terlalu Membebani mereka dalam melaksanakan program e-KTP.mereka sudah menganggarkan dana

dikenakan biaya pembuatan e-KTP karena pemerintah Kota Yogyakarta sudah menganggarkan dana untuk pembuatan e-KTP.artinya peralatan, sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah cuku baik dan cukup memenuhi kebutuhan petugas dan masyarakat.sehingga hal tersebut membantu pelaksanaan program e-KTP

3. Disposisi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan,komitmen atau kemauan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada sikap yang kuat dari seluruh stakeholders untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen untuk mensukseskan pelaksanaan program e-KTP harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang menjadi target atau sasaran kebijakan. Komitmen yang kuat dapat menjadi modal bagi terlaksananya kebijakan. Dengan adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana program berpikir dan bertindak untuk mensukseskan implementasi kebijakan.

Pelaksana (implementor) e-KTP memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e-KTP. Komitmen ini muncul dengan sendirinya sejak kota Yogyakarta masuk dalam 197 kabupaten/kota yang melaksanakan program e-KTP pada tahun 2011 lalu.

sebagai salah satu dari kota pertama yang melaksanakan program e-KTP pemerintah kota Yogyakarta harus menunjukkan kemauan dan spirit yang tinggi dalam mengimplementasikan e-KTP.Hal ini menjadi kesempatan dan

dan Pencatatan sipil Dengan menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerja dan prestasi yang gemilang.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta sangat berkomitmen dalam pelaksanaan program e-KTP seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil"kita sangat berkomitmen untuk segera menuntaskan e-KTP ini,tetapikan ada kendala"[16].

Menurutnya salah satu kendala itu adalah mobilitas masyarakat kota Yogyakarta sangat tinggi,sehingga pada pemuktahiran data sebelumnya,data yang mereka terima tidak valid.mobilitas masyarakat menyebabkan data jumlah penduduk kota Yogyakarta juga tidak bisa menjadi patokan.hal ini terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang awalnya mengurus surat pindah ke Yogyakarta kemudian tindak mengurus surat pindah begitu keluar dari kota,itulah mengapa bahkan alat perekaman e-KTP di datangkan ke kampus dan tempat padat penduduklainya.

Selain itu bentuk komitment dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil yaitu,membuat alat mobile sendiri tanpa biaya dari pusat.dengan mengalokasikan dana sebesar 56 juta untuk satu alat mobile yang terdiri dari pc mobile,server dan mobil.

Sedangkan komitment masyarakat kota Yogyakarta terhadap program e-KTP juga baik,adapun kenapa masyarakat terkadang susah untuk melakukan perekaman data di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dengan alasan kerja dan sebagainya,namun biasanya pada hari libur jumlah warga yang hadir untuk melakukan perkaman data meningkat.

---

[16] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Daddy Frizza 15 november 2012 di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Seperti yang dikatakan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil"masyarakatkan kadang sibuk bekerja,kita memakluminya biasanya pada hari libur atau weekend jumlah yang melakukan perekaman data meningkat"[17].

Adapun dukungan dan komitmen masyarakat kota Yogyakarta terhadap program e-KTP yang didapat dari survey terhadap 50 orang yaitu:

Tabel 20. Pendapat Masyarakat

Pilihan	Jumlah /orang	persentase
Sangat baik	15	30%
Baik	35	70%
Cukup baik	0	
Kurang baik	0	
Sangat kurang baik	0	0
Total	50	100%

Setelah dilakukan pengolahan data maka hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 13. Tingkatan Pendapat Masyarakat

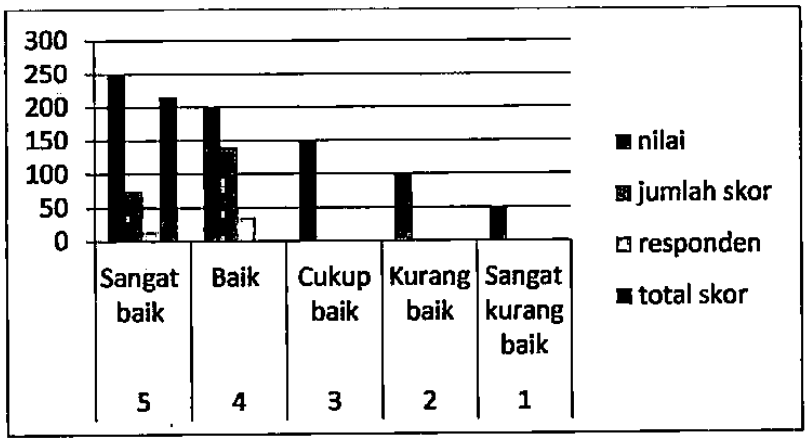

[17] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

Dari data diatas 70% masyarakat Yogyakarta mengaku mendukung dengan baik terhadap program e-KTP Yogyakarta dan 30% mendukung dengan baik,artinya warga kota Yogyakarta mendukung dengan baik program e-KTP,dukungan atau komitment dari pelaksana dan masyarakat merupakan faktor penting dalam implementasi.jika pelaksana dan masyarakat bersikap baik dalam program e-KTP dalam hal ini adanya dukungan maka kemungkinan besar mereka melaksanakanya sebagai mana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.demikian pula sebaliknya jika sikap pelaksana dan masyarakat tidak mendukung maka implementasi kebijakan akan semakin sulit.

Masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta mendukung program e-KTP namun ada kendala yang di hadapi,sedikitnya jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan perekaman data pada awal implementasi yaitu dikarenakan berbenturan dengan jam kerja.

Walaupun terkadang hanya sedikit masyarakat yang datang setiap harinya untuk melakukan perekaman data,itu dikarenakan mereka sibuk dengan pekerjaanya dan mereka baru bisa melakukan perekaman data di hari libur sehingga pada hari libur masyarakat harus mengantri lama untuk

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program e-KTP dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab menginisiasi program e-KTP. Di Kota Yogyakarta, instansi yang terlibat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Asisten Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum,Kecamatan dan seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta.

Secara umum,Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil menjadi ujung tombak implementasi program e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil bertanggungjawab melakukan sosialisasi, mengorganisir masyarakat, memverifikasi data, mengentri data,mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP.

Setelah semua proses itu dilakukan,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunggu hasil jadi e-KTP dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang akan didistribusi kecamatan di Kota yogyakarta. Dengan kata lain, hasil jadi e-KTP masih dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke daerah, karena peralatan pencetak hasil jadi e-KTP hanya ada di Kementerian Dalam Negeri. Pencetakan hasil jadi e-KTP yang dimonopoli oleh Kementerian Dalam Negeri menimbulkan ekses negatif, yaitu keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e-KTP kepada wajib KTP yang telah mengurus e-KTP di daerah.

Struktur birokrasi pencetakan e-KTP yang masih panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan e-KTP karena terjadinya keterlambatan distribusi e-KTP. Masyarakat mengeluhkan lamanya proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan e- KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan proses akhir pembuatan e-KTP di kecamatan.

Table 21. Struktur Birokrasi Implementasi Program e-KTP

No	Nama	Peran Dan Fungsi
1	Kementerian Dalam Negeri	Pemegang program dan anggaran implementasi e-KTP
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Eksekutif penanggung-jawab implementasi program e-KTP
3	Asisten Pemerintahan	Koordinasi implementasi program e-KTP
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencana anggaran implementasi program e-KTP
5	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemegang anggaran implementasi program e-KTP
6	Badan Kepegawaian Daerah	Penata personel dan tenaga operator e-KTP
7	Inspektorat	Pengawas implementasi program e-KTP
8	Bagian hukum	Penasihat hukum implementasi program e-KTP
9	Kecamatan	Pelaksana proses pembuatan e-KTP
10	Kelurahan	Membantu kecamatan mengorganisir masyarakat untuk membuat e-KTP

Dikota Yogyakarta sendiri hasil perekaman data sudah diserahkan kepusat sejak mei 2012 yang berjumlah 262.300 dan kota yogyakarta

sudah didistribusikan ke kecamatan. seperti yang dikatakan Deddy" Dari jumlah wajib KTP sebanyak 265.000 orang, kami baru menerima 170.000 keping e-KTP. Sudah didistribusikan ke masing-masing kecamatan"[18].

Fakta lain yang ditemukan di lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) e-KTP, sehingga implementor di level bawah kesulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Melalui SOP, birokrasi di tingkat bawah memiliki panduan baku mengenai pelaksanaan e-KTP.

Namun, dalam implementasi e-KTP, Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan tersebut tidak menyediakan SOP e-KTP. Departemen Dalam Negeri hanya memberikan catatan-catatan presentasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Deddy mengatakan"ya tidak ada SOPnya kita hanya melaksanakan semampunya,pihak pusat Cuma menyerahkan dokument presentasi mengenai e-KTP"[19]. Tidak tersedianya SOP pelaksanaan e-KTP mengakibatkan sulitnya petugas menginterpretasikan proses pembuatan e-KTP.

Dari data diatas maka telihat bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan e-KTP di kota Yogyakarta dengan adanya lapisan atau tingkatan yang sangat panjang membuat pelaksanaan e-KTP tidak efektif.Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta mungkin Sudah melakukan perekaman data hampir menyeluruh namun tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta harus menunggu e-KTP

---

[18] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Deddy Frizza 15 november 2012 di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

[19] Hasil wawancara dengan Kepala seksi data dan informasi Dinas Kependudukan dan pencatatan

dari pusat untuk didistribusikan,yang jelas ini memakan waktu yang lama,padahal masyarakat sudah tidak sabar menunggu hasil e-KTPnya.

Belum lagi tidak ada SOP mengenai pelaksanaan e-KTP dari pusat padahal SOP sangat penting bagi pelaksana untuk menanggulangi kendala-kendala umum dan untuk menyeragamkan tindakan-tindakan yang akan diambil,karena para pelaksana terkadang tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan dari persoalan yang mereka temui dan biasa mereka hanya menggunakan prosedur biasa.jika pemerintah pusat memberikan SOP mengenai pelaksanaan e-KTP maka ini akan mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program tersebut hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan e-KTP dikota

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai implementasi program e-KTP di kota Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhinya penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sosialisasi e-KTP sudah dilakukan dengan cukup baik dan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil jauh hari sebelum perekaman data dimulai dengan kerjasama di tingkat kecamatan dan perguruan tinggi sosialiasi mengunakan media,poster,dan seminar .
2. Pembagian undangan dilakukan sesuai prosedur,Undangan pembuatan e-KTP dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Yogyakarta kemudian diserahkan ke 14 kecamatan Di kota Yogyakarta dan kecamatan akan membagikan undangan tersebut kepada masyarakat dengan bantuan lurah ataupun kepala desa.
3. Proses perekaman data e-KTP di Kota Yogyakarta belum selesai, september 2012 masih ada sekita 70.000 warga yang belum melakukan perekaman data,hal ini dikarenakan pemuktahiran data yang kurang akurat,dan mobilisasi warga kota Yogyakarta sangat tinggi
4. Pembagian e-KTP sudah dilakukan sejak juni 2012 dari jumlah e-KTP sebanyak 265.000 Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil baru menerima 170.000 .e-KTP yang diterima baru 66% dari total data yang sudah dikirim kepusat dan sudah di distribusikan,adapun kendala dalam pembagian e-KTP yaitu kegagalan saat proses verifikasi dan validasi data